

**LAPORAN KOMISI I DPR RI
MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I TERHADAP
RUU TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SWEDIA
TENTANG KERJA SAMA DALAM BIDANG PERTAHANAN
(*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN
CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE*)
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 5 OKTOBER 2020**

**Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI;
Yth. Saudara Menteri Hukum dan HAM;
Yth. Saudara Menteri Pertahanan atau yang mewakili;
Yth. Saudara Menteri Luar Negeri atau yang mewakili;
Yth. Saudara-Saudara Anggota Dewan; dan
Hadirin sekalian yang kami muliakan.**

***Assalammu 'alaikum Wr. Wb.*
Salam sejahtera bagi kita semua.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam keadaan sehat wal'afiat untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Kingdom of Sweden concerning Cooperation in the Field of Defence*).

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tersebut di atas.

Dapat kami sampaikan bahwa Presiden RI melalui Surat Presiden RI No: R-8/Pres/02/2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan dan menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI tanggal 26 Februari 2020 yang telah menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan bersama-sama dengan Pemerintah, maka Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 15 Juli 2020 memutuskan untuk melaksanakan pembahasan terhadap RUU tersebut.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tersebut di atas, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Pakar/Akademisi dalam rangka mendapatkan masukan terhadap RUU tersebut. Selanjutnya Komisi I DPR RI telah melaksanakan Pembicaraan Tingkat I dalam Raker dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) pada tanggal 30 September 2020 untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan.

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I tersebut di atas berlangsung secara kritis, mendalam, dan terbuka. Akhirnya Fraksi-Fraksi di Komisi I DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan untuk selanjutnya dibahas dalam Pembicaraan Tingkat II dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Aspek pertahanan secara signifikan menentukan posisi tawar suatu negara dalam tatanan hubungan antar-negara dan politik internasional. Oleh karena itu, aspek pertahanan negara mesti dianggap sebagai prasyarat bagi suatu negara untuk menangkal segala ancaman yang membahayakan suatu negara.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, model ancaman terhadap negara juga mengalami perkembangan bentuk dan tingkatannya. Ancaman yang ada saat ini tidak hanya

dapat berasal dari negara lainnya yang umumnya dalam bentuk agresi militer atau yang dikenal sebagai ancaman konvensional (*conventional threats*), namun juga ancaman model baru atau *non-conventional threats* yang berasal dari aktor non-negara (*non-state actors*), tidak terbatas pada jenis ancaman militer (*non-military threats*), dan umumnya bersifat lintas-negara (*trans-national threats*).

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, kerja sama antar-negara menjadi sangat diperlukan mengingat tidak ada negara yang dapat mengatasi ancaman tersebut secara sendiri. Selain itu pula, berlandaskan pada keinginan untuk turut serta dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara agar dapat memberikan kontribusi positif bagi penjagaan ketertiban dan perdamaian dunia.

Kerja sama antar-negara dalam pertahanan tidak hanya ditujukan untuk meminimalisir potensi ancaman yang ada namun juga ditujukan guna meningkatkan kemampuan industri pertahanan sebuah negara. Melalui kerja sama dengan negara yang memiliki kemampuan pertahanan yang sudah diakui, sebuah negara dapat belajar dan menyerap pengetahuan dan teknologi terkait pertahanan yang sudah terlebih dahulu dimiliki oleh negara lainnya melalui skema transfer teknologi.

Kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Swedia dapat dianggap sebagai tindakan berdaulat Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Swedia dengan pertimbangan untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan pertahanan didasarkan prinsip kesetaraan, saling percaya, dan pengertian.

Komisi I DPR RI berharap dengan disetujuinya RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan menjadi Undang-Undang dapat mendukung peningkatan kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, dan menghormati kedaulatan dan integritas wilayah kedua negara.

Melalui persetujuan ini terdapat keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi. Di samping itu, kami mengharapkan kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik Indonesia-Swedia dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan;
Hadirin yang kami muliakan.**

Demikian Laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan. Selanjutnya, Komisi I DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR RI hari ini terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden guna disahkan menjadi Undang-Undang.

Mengakhiri Laporan Komisi I DPR RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para Anggota Dewan yang terhormat yang telah mempercayakan Komisi I DPR RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap RUU tersebut di atas. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Anggota Komisi I DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan RUU tersebut di atas. Selanjutnya kepada Setjen DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi I DPR RI dan kalangan Pers, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

**Sekian dan terima kasih
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.***

PIMPINAN KOMISI I DPR RI
KETUA,

ttd

MEUTYA VIADA HAFID
A-267